

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tidak hanya tempat berlindung, tetapi juga merepresentasikan relasi kuasa yang kompleks dalam struktur sosial masyarakat. Proses pembangunan perumahan sering kali menggambarkan dinamika sosial yang lebih luas, di mana kebijakan pemerintah, kepentingan swasta, dan kebutuhan masyarakat berinteraksi dengan cara yang kompleks (Soesilowati, 2007). Berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bab 1 Pasal 1 ayat 7 rumah ialah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuni, serta aset bagi pemiliknya¹. Dari hal ini dapat diketahui bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai tempat berlindung dan melakukan aktivitas lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Rumah layak huni menjadi peranan penting dalam terciptanya ketahanan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.11 Tahun 2022 yang menjadi indikator rumah layak huni ialah rumah yang bersih dan memiliki komponen struktur secara fisik².

¹ Istilah Kawasan Permukiman dalam UU RI No.1 Tahun 2011 merujuk pada wilayah yang terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung untuk membangun kehidupan yang layak bagi masyarakat. Kawasan ini tidak hanya mencakup area tempat tinggal (hunian) tetapi juga kawasan yang direncanakan untuk perkembangan pemukiman yang melibatkan fasilitas yang memungkinkan masyarakat untuk tinggal, bekerja, dan berinteraksi sosial. Fasilitas umum dan sosial yang dimaksud dapat berupa sarana transportasi, sanitasi, pendidikan, kesehatan, hingga ruang terbuka publik yang mendukung kualitas hidup.

² Peraturan yang diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan kebijakan dan teknik dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Peraturan ini secara khusus berfokus pada penataan kawasan permukiman, dengan tujuan untuk mendukung pengelolaan dan

Dengan demikian fungsi dan peranan rumah layak huni menjadi modal sosial dan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka peluang perbaikan kehidupan.

Kemampuan masyarakat dalam menyediakan perumahan yang layak huni berkorelasi dengan pendapatan dan pemahamannya terhadap tujuan dari rumah tersebut. Faktanya, membangun rumah yang layak huni adalah perkara yang sulit. Rumah tersebut secara teknis maupun non teknis layak huni sebagai tempat tinggal tetap (Basir & Asmuliary, 2021). Fakta ini menjadi salah satu indikator kemiskinan, yang menunjukkan bahwa terdapat rumah tidak layak huni yang ditempati masyarakat. Kondisi demikian menjadi penghantar peneliti untuk fokus pada salah satu kebijakan sebagai upaya pemerataan rumah layak huni yang masih sulit tercapai hingga saat ini.

Menurut Peraturan Menteri No.22/Permen/M/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Melalui tiga poin identifikasi yakni, 1) Terpenuhinya syarat keselamatan bangunan yang mana bangunan rumah tidak berada di daerah potensi banjir, tidak berada di sepadan sungai, tidak berada di jalur aliran tegangan tinggi, tidak berada di daerah rawan longsor, dan memenuhi syarat konstruksi bangunan meliputi; fondasi, slof, atap, dan dinding. 2) Kecukupan luas minimum

pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan memenuhi standar teknis serta kualitas hidup yang layak bagi masyarakat.

bangunan dengan perhitungan standar luas minimum untuk 4 jiwa yakni 60m^2 sementara standar luas bangunan untuk 4 jiwa sejumlah 36m^2 dan standar volume 1 jiwa yakni $3 \times 3 \text{ M}$.

Hal ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan secara nasional dan berlaku di seluruh kabupaten/kota disampaikan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002. 3) Syarat kesehatan dan kenyamanan penghuni, dengan meninjau beberapa indikator di antaranya; kecukupan cahaya yang masuk dengan bukaan $20 \times 20 \text{ m}$ untuk sirkulasi panas, penghawaan yang memadai dengan luas bukaan jendela minimal $1/9$ luas ruang lantai, suhu udara dan kelembaban yang baik dan adanya sanitasi serta septik tank di setiap rumah. Dengan demikian, rumah layak huni harus memenuhi standar keselamatan, kecukupan luas, serta kesehatan penghuni agar dapat memberikan lingkungan tempat tinggal yang aman dan berkualitas.

Pemahaman mengenai standar rumah layak huni sebagaimana ditetapkan dalam regulasi sering kali berbeda dengan persepsi dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan observasi peneliti, masyarakat cenderung mendefinisikan kelayakan hunian secara pragmatis, yakni selama rumah masih bisa dihuni maka dianggap layak dan tidak perlu dilakukan perbaikan, tanpa mempertimbangkan aspek teknis seperti luas lahan bangunan, sanitasi yang memadai ataupun penghawaan. Seperti beberapa rumah yang ditemui, di Kabupaten Bireuen terdapat rumah yang tidak memiliki akses MCK dan tidak adanya sanitasi, bahkan ditemukan rumah yang tidak memiliki jendela, fondasi yang sudah lapuk dan atap yang bocor.

Adanya terlihat kesenjangan dalam kompleks perumahan, seperti terdapat satu rumah papan yang diapit oleh dua rumah beton besar ataupun terdapat satu rumah yang masih terbuat dari papan dan berada di tengah ruko-ruko besar. Hal ini menunjukkan pemerataan rumah layak huni masih belum tercapai. Begitu pun di daerah lain seperti Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen memiliki kondisi yang serupa dengan tingginya angka rumah tidak layak huni. Hal ini di dukung oleh angka penerima bantuan perbaikan rumah di kedua kecamatan tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian PUPR 2024, penerima bantuan stimulan perumahan swadaya terdapat 518 penerima bantuan di Kabupaten Bireuen, dengan sebaran di antaranya 35 penerima bantuan di Kecamatan Kota Juang dan 30 penerima bantuan di Kecamatan Jeumpa³.

Kepemilikan rumah sebagai salah satu kebutuhan primer tempat melakukan berbagai aktivitas juga memberikan fungsi dan makna lain dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (Rustina, 2014). Kondisi saat ini di Indonesia, kepemilikan rumah layak huni masih belum mampu didapatkan oleh sebagian masyarakat, terlihat jelas dengan adanya permukiman-permukiman kumuh bahkan di wilayah kota besar. Di Indonesia, 36,85 persen rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni, yang berarti jumlah tersebut melebihi sebagian jumlah penduduk Indonesia (Pristiandaru, 2024 dalam Kompas.com). Sekitar 36 hingga 37 dari 100 rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni tampaknya masih mengalami masalah ini. Persentase ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, menurut

³ Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh. No. 381/Kpts/Rb. 1.6/2024 Tentang Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bireuen yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR untuk daftar nama calon penerima bantuan.

Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023. Terjadinya penurunan dibandingkan dengan tahun lalu memang menjadi sebuah kabar baik namun bukan berarti kita tidak lagi mengusahakan perbaikan. Kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya angka kemiskinan masyarakat Indonesia.

Badan Pusat Statistik dalam Berita Statistik No.47/07/Th.XXVI,17 menyatakan bahwa rata-rata rumah tangga miskin Indonesia berjumlah 4,71 jiwa pada Maret 2023. Oleh karena itu, Rp 2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan merupakan rata-rata Garis Kemiskinan per rumah tangga. Pada Maret 2023, garis kemiskinan bulanan sebesar Rp550.458 per orang. Garis Kemiskinan naik sebesar 2,78 persen antara bulan September 2022 hingga Maret 2022 dan 8,90 persen antara bulan Maret 2022 hingga September 2022. Hal ini terlihat dari penelaahan unsur-unsur Garis Kemiskinan (GK) yang meliputi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non- Garis Kemiskinan Pangan (GKBM), bahwa komoditas pangan masih mempunyai peranan yang jauh lebih besar dibandingkan komoditas non pangan. Sementara itu, perumahan menyumbang porsi terbesar GK perkotaan dan pedesaan (8,81 persen di perkotaan dan 8,38 persen di pedesaan) di antara komoditas non-makanan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menginisiasi program perbaikan rumah salah satunya adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (Indayani & Sadriah, 2020).

Program ini sudah ada dari tahun 2015 hingga sekarang dan mampu menghasilkan lebih dari 3,4 juta unit per tahun. Regulasi mengenai BSPS dijelaskan dalam Peraturan Kementerian PUPR Nomor 07/PRT/M/2022, yang menekankan pada peningkatan kualitas rumah swadaya dan perbaikan rumah secara intensif⁴.

Pemerintah pusat memiliki wewenang dalam menentukan alokasi anggaran dan standar teknis, sedangkan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pendataan dan distribusi bantuan. Proses penentuan penerima bantuan perumahan melibatkan berbagai tahapan administrasi, pendataan, verifikasi kelayakan, dan evaluasi lapangan (Ethelbert et al., 2022). Ini menunjukkan bagaimana kebijakan yang bersifat *top-down* tetap bergantung pada aktor-aktor lokal dalam implementasinya. Adanya regulasi dari pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat untuk menetapkan penerima bantuan tentu memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan kebijakan berjalan di tengah masyarakat.

Penetapan daerah penerima bantuan nyatanya dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepala Gampong dan pemegang aktor kekuasaan terkait. Usulan nama penerima bantuan inilah yang kemudian dipertimbangkan oleh pusat untuk kembali diverifikasi kelayakan penerima bantuan (Muslan Jois et al., 2024). Namun sering kali dilihat bahwa adanya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, bahkan terjadinya penerimaan ganda sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Faisal selaku Kepala Balai Penyedia Perumahan Sumatera 1⁵. Hal inilah

⁴ Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman dalam penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, baik dalam konteks pembangunan rumah bersubsidi maupun kawasan permukiman yang memadai, dengan dukungan pembiayaan yang melibatkan peran serta pemerintah.

⁵ Kepala Balai Penyedia Perumahan Sumatera 1 adalah pejabat yang memimpin unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sumatera I, yang

yang kemudian harus diperhatikan lebih lanjut karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial, nepotisme ataupun penerima bantuan yang berhenti di tengah program karena tidak mampu secara finansial dan tidak memahami alur pelaksanaan program. Realitas yang kompleks mengenai pelaksanaan program BPS berkeanaan dengan akses rumah layak huni di Indonesia, terutama di Kecamatan Jeumpa, menjadi latar belakang utama ketertarikan peneliti untuk menyelidiki lebih dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Melalui metode pemberdayaan masyarakat dalam memverifikasi data dan mengidentifikasi kemampuan swadaya masyarakat agar pembangunan rumah menjadi layak huni dapat tercapai (Lampiran II SE No.14/SE/Dr/2022). Tetapi disampaikan oleh Bapak Faisal Kepala Balai Penyedia Perumahan Sumatera 1 bahwa realitasnya tidak semua penerima bantuan mampu memberikan swadaya yang cukup untuk menunjang pembangunan (Wawancara bersama Bapak Ka Balai BP2P Provinsi Aceh). Kondisi lain peneliti temukan saat observasi bahwa masyarakat memahami bahwa rumah mereka sudah layak untuk mendapatkan bantuan, dan mereka memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki, sementara jika ditinjau dari standar rumah layak huni masih dikategorikan layak sehingga tidak bisa diberikan bantuan. Hal ini kemudian menjadi tantangan dalam keberhasilan program BSPS karena setiap individu dinilai memiliki kekuasaan dan pengetahuan yang berkembang dengan dinamis di masyarakat baik mengenai

berkedudukan di Banda Aceh, memiliki wilayah kerja di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

standar rumah layak huni, begitu pun dengan kemampuan masyarakat untuk memberikan tambahan swadaya.

Dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya pada nyatanya masih terdapat evaluasi-evaluasi berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan seperti adanya penilaian tidak tepat sasaran yang diberikan oleh tim pengusul, ataupun keterlibatan tim pengusul yang secara tidak tertulis ada dalam peraturan, pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur ataupun masyarakat yang memiliki persepsi berbeda mengenai program bantuan ini (Dharma & Bangun, 2022). Selain itu, pengetahuan lokal merupakan konsep kunci dalam antropologi yang mengacu pada pengetahuan, praktik dan kepercayaan yang dikembangkan oleh komunitas lokal melalui pengalaman langsung dan interaksi yang terbangun. Dalam konteks ini, program BSPS memainkan peranan pengetahuan lokal ini sebagai posisi kunci dalam melihat bagaimana program diterima dan dipahami masyarakat di lapangan.

Masyarakat memiliki cara pandangan unik terhadap rumah sebagai simbol status sosial. Pemahaman mereka tentang rumah layak huni tidak semata-mata disandarkan pada teknis yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga mengacu pada nilai-nilai lokal. Di samping itu, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang berkembang juga perihal tradisi dan kepercayaan selama proses pembangunan berlangsung yang melibatkan tokoh adat maupun unsur kekerabatan dan pemerintah daerah lainya (Winarto & Choesin, 2014).

Hubungan antara pemerintah, fasilitator lapangan, masyarakat penerima bantuan, tokoh adat, masyarakat lainnya mencerminkan bagaimana pengetahuan

diproduksi, dipertukarkan, dan diakui. Oleh karena itu, pemikiran dari Foucault tentang *power/knowledge* relevan untuk meninjau proses sosial ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pengetahuan yang dihasilkan oleh pemerintah (standar rumah layak huni, prosedur teknis) sering kali menjadi kekuatan dominan, sementara pengetahuan lokal masyarakat juga memiliki potensi untuk menentang maupun menegosiasikan kekuasaan formal agar kebijakan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan kebutuhan mereka.

Mengkaji lebih dalam mengenai relasi aktor-aktor yang terkait dalam praktik program bantuan stimulan perumahan swadaya menjadi menarik bagi peneliti, karena dengan memahami berjalanya relasi kuasa antar aktor yang terlibat dapat menjadi lensa untuk meninjau bagaimana kebijakan dan praktik pemerintah mempengaruhi individu khususnya penerima bantuan. Hal ini menekankan pada hubungan yang diperintah yakni penerima bantuan dengan yang memerintah yaitu pemerintahan selaku pembuat kebijakan sehingga mendapatkan pemahaman bagaimana kebijakan dan pembangunan berlangsung di masyarakat. Melalui hal ini peneliti melihat hubungan timbal balik antar aktor dengan masyarakat, serta dapat melihat seberapa penting program ini hadir bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam membantu menciptakan rumah layak huni.

Sebagian besar kajian mengenai kebijakan dan pembangunan ini hanya dilihat berdasarkan aspek teknis dan statistik melalui pendekatan kuantitatif untuk melihat keberhasilannya (Murdiyana & Mulyana, 2017). Namun kali ini peneliti mencoba memberikan pandangan baru melalui pendekatan antropologi dengan metode kualitatif menempatkan deskripsi mengenai interaksi manusia, nilai-nilai

budaya, institusi, pengetahuan lokal menjadi inti analisisnya terutama dalam program perumahan yang dijalankan kementerian PUPR tahun ini. Hal ini memiliki potensi besar dalam mengungkap bagaimana regulasi nasional tidak hanya diterapkan tetapi juga dinegosiasikan, diadaptasi, dan bahkan ditantang oleh dinamika sosial masyarakat serta epistemologi lokal (Umanailo, 2019).

Dengan memahami dinamika ini kita dapat mengidentifikasi berbagai hal seperti bagaimana masyarakat memahami program, bagaimana masyarakat memosisikan pengetahuan dalam pelaksanaan program dan adanya relasi kuasa berperan dalam pelaksanaan program BSPS yang secara aturan tidak dibenarkan hal ini dapat menimbulkan konflik selama kegiatan berlangsung serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program BSPS. Dinamika ini diasumsikan berkaitan dengan adanya aktor-aktor yang berperan dalam implementasi program dalam masyarakat.

Menjelaskan tentang aktor dan bentuk kekuasaan yang didasari oleh kebebasan diidentik dengan adanya praktik pemberdayaan. Hal ini tentu selaras dengan metode pelaksanaan program BSPS. Sebagaimana konsep pemberdayaan yang disampaikan Li, bahwa pemberdayaan itu berkaitan dengan upaya mengubah kapasitas masyarakat dan kemampuan masyarakat dari yang *powerless* menjadi *empowered* (Mudhoffir, 2011). Praktik pemberdayaan tersebut berlangsung seiring dengan implementasi program BSPS.

Penelitian ini menjadi bagian dari kajian antropologi sosial karena menempatkan interaksi manusia, institusi, dan kebudayaan sebagai inti analisisnya. Sebagaimana fokus penelitian melihat relasi kuasa yang terbangun dan berdampak

terhadap implementasi program BPS dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat. Dalam konteks ini, relasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitator dan masyarakat penerima bantuan menjadi pusat perhatian dimana kekuasaan itu tidak hanya dijalankan tetapi di negosiasikan dan dipertahankan (Noor et al, 2022).

Analisis ini mencerminkan perhatian antropologi sosial terhadap dinamika kekuasaan dalam masyarakat yang menempatkan interaksi pengetahuan lokal dalam berjalanya kebijakan, serta melihat benturan regulasi dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Perspektif ini menyoroti pentingnya epistemologi lokal dalam memahami bagaimana kebijakan diterapkan dan diterima oleh masyarakat, sebuah pendekatan yang khas dalam antropologi sosial yang memandang pengetahuan sebagai bagian integral dari budaya (Foucault, 2002). Selain itu, kajian ini juga sejalan dengan antropologi pembangunan yang melihat intervensi pembangunan dapat mempengaruhi struktur sosial dan hubungan kekuasaan di masyarakat.

Akhirnya, penelitian ini menempatkan konteks budaya lokal sebagai elemen penting dalam memahami dinamika kebijakan publik. Tradisi lokal dan pemahaman masyarakat terhadap konsep rumah layak huni memainkan peran penting dalam interaksi mereka dengan kebijakan formal (Hiwy & Sholichah, 2022). Hal ini menunjukkan bagaimana antropologi sosial dapat berkontribusi secara signifikan dalam memahami kebutuhan masyarakat dan menegaskan bahwa pendekatan berbasis budaya dalam perumusan kebijakan menjadi poin krusial agar kebijakan yang diterapkan lebih adaptif dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengetahui dan mengungkap bagaimana relasi kuasa antar aktor dapat terbentuk dan pengetahuan berperan dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan mengapa relasi kuasa itu menjadi penting dalam pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

B. Rumusan Masalah

Adanya kebijakan publik selalu melibatkan interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diluncurkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun program ini dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan perumahan, dalam praktiknya sering kali masyarakat hanya menerima bantuan tanpa memanfaatkan potensi yang ada secara optimal (Kasmawati, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program dan sejauh mana masyarakat benar-benar terlibat dalam pelaksanaannya.

Relasi kuasa antara aktor-aktor dalam pelaksanaan program BPS sangat kompleks. Pemerintah sebagai pengambil keputusan memiliki kekuatan untuk menetapkan kebijakan, sementara masyarakat sebagai penerima bantuan diharapkan berpartisipasi aktif (Alfiansyah et al., 2023). Namun, terdapat dinamika yang dapat berujung pada konflik atau kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya II, Bapak Sakti Akbari, S.Ars bahwa:

Program BSPS ini jika dibandingkan dengan program PUPR lainnya merupakan sebuah program yang paling banyak melibatkan banyak aktor masyarakat, ataupun pemerintah lainnya. Melibatkan banyak aspek dimana pemberian bantuan kepada sepuluh orang dalam satu gampong tidak berarti hanya berinteraksi dengan sepuluh kepala keluarga saja, tetapi juga menghadapi dinamika internal keluarga besar mereka (Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Bapak Sakti Akbari, S.Ars, 29 Tahun)

Selain itu adanya persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai kriteria kelayakan, hal ini dapat mengakibatkan penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Begitupun kepercayaan yang berkembang di antara masyarakat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan program ini.

Pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat menjadi kekuatan yang dapat mendukung keberhasilan program (Nugroho et al., 2018). Namun, apabila pengetahuan tersebut tidak diakomodasi dalam kebijakan atau jika masyarakat merasa tidak didengarkan, maka hal ini dapat menghambat partisipasi mereka. Kondisi ini memunculkan tantangan baru dalam implementasi BPS yang memerlukan perhatian khusus untuk menghindari kecemburuan sosial dan meningkatkan keadilan dalam distribusi bantuan.

Kajian ini menarik untuk memahami bagaimana relasi kuasa yang terbentuk dalam implementasi program BPS di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika kekuasaan, partisipasi, dan pengetahuan masyarakat dalam konteks kebijakan perumahan, serta untuk memahami bagaimana hal ini berdampak pada kesuksesan program. Dengan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antar aktor, diharapkan dapat ditemukan solusi yang

lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencapai tujuan program secara berkelanjutan.

Maka dari itu, peneliti mengungkap bagaimana relasi kuasa yang terbentuk dalam implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bireuen. Hal ini kemudian coba dirincikan dalam pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Gampong Blang Cot Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh?
2. Bagaimana terbentuknya relasi kuasa dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Gampong Blang Cot Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh?
3. Mengapa relasi kuasa itu menjadi penting dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Gampong Blang Cot Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bireuen.
2. Mengetahui terbentuknya relasi kuasa yang dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bireuen
3. Menjelaskan urgensi dari relasi yang kuasa yang terhadap implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Bireuen.

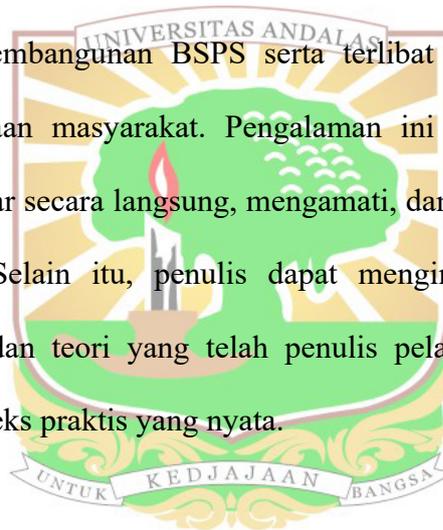
D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai partisipasi dan analisis swadaya masyarakat dalam program BSPS ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan dari segi teoritis dan dari segi praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini, penulis memiliki kesempatan yang berharga untuk turut serta secara aktif dalam mendampingi masyarakat pada program pembangunan BSPS serta terlibat langsung dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pengalaman ini memungkinkan penulis untuk belajar secara langsung, mengamati, dan menganalisis realitas di lapangan. Selain itu, penulis dapat mengimplementasikan metode penelitian dan teori yang telah penulis pelajari selama perkuliahan dalam konteks praktis yang nyata.



b. Bagi lembaga

Penelitian ini bermanfaat bagi institusi terkait dan menjadi rekomendasi dalam pelaksanaan program BSPS terutama bagi satuan kerja di Provinsi Aceh melalui Direktorat Jenderal perumahan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih tentang cara pandang pengetahuan sebagai kekuasaan masyarakat terhadap program Bantuan Perumahan Swadaya. Sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan teknis pelaksanaan kerja oleh tenaga fasilitator lapangan, sekaligus

menjadi bahan evaluasi kerja bagi Pejabat Pembuat Kebijakan maupun Tenaga Ahli.

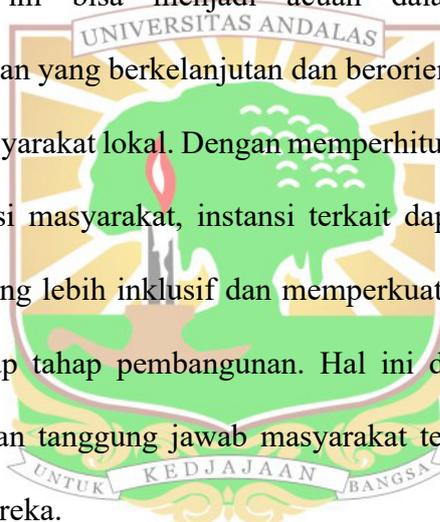
2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini secara konkret diajukan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Antropologi.

b. Bagi Lembaga/ Institusi

Penelitian ini bisa menjadi acuan dalam menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan dan potensi masyarakat lokal. Dengan memperhitungkan pengetahuan lokal dan persepsi masyarakat, instansi terkait dapat merancang program-program yang lebih inklusif dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan di wilayah mereka.



c. Tinjauan Pustaka

Setiap penelitian kajian-kajian sosial dan pembangunan, menjadi penting tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melihat permasalahan. Tinjauan teoritis dalam sebuah penelitian memiliki peran yang sangat krusial, karena ia berfungsi sebagai kerangka kerja yang membimbing seluruh proses penelitian (Hasanah, 2017). Dengan merujuk pada teori-teori yang

relevan, peneliti dapat menjelaskan fenomena yang diteliti dalam konteks yang lebih luas, memberikan makna dan penjelasan yang lebih mendalam.

Begitu pun dengan penelitian terdahulu memberikan wawasan mengenai temuan-temuan sebelumnya yang dapat memperkaya analisis. Dengan mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi celah yang ada dalam literatur, serta memahami metode dan pendekatan yang telah digunakan. Hal ini bukan hanya membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih tepat, tetapi juga menghindari pengulangan penelitian yang sama dan memberikan landasan yang solid bagi validitas hasil yang akan diperoleh. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan dibagi menjadi dua bagian yakni tinjauan teoritis, dan penelitian terdahulu.

1. Tinjauan Teoritis

Kekuasaan sering kali menjadi perbincangan dalam wacana politik, sosiologi dan kajian antropologi. Dalam pembahasan tersebut, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dari pemegang kekuasaan itu sendiri (Syafiuddin, 2018). Namun definisi kekuasaan ini tergantung pada sudut pandang seseorang, kekuasaan itu sendiri bisa mempunyai arti yang bermacam-macam. Salah satu pemikir besar yang memiliki gagasan tentang kekuasaan adalah Michel Foucault, yang berpendapat bahwa gagasan tentang kekuasaan tidak disandarkan pada kontrol ekonomi atau manipulasi ideologi saja, seperti yang terjadi pada Marx atau Weber. Sebaliknya, ini adalah kata yang menggambarkan untuk situasi sosial strategis yang rumit (Foucault, 2002).

Definisi kekuasaan yang ditawarkan oleh Foucault berbeda dengan apa yang sering kali kita pahami. Pada dasarnya kekuasaan diartikan sebagai daya atau posisi yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau lembaga untuk memaksakan kemauannya kepada pihak lain. Kata kuasa dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Jerman memiliki makna sebagai kekuasaan. Kekuasaan yang senantiasa memosisikan ada penguasa dan orang yang dikuasai, berbeda dengan pemaknaan dari Foucault yang mengartikan kekuasaan sebagai hal netral dan positif dengan menyatakan bahwa kekuasaan ada dimana-mana dan dimiliki oleh semua orang (Kebung, 2018). Foucault memiliki cara yang orisinal dalam memahami makna kekuasaan, kekuasaan diartikan secara represif dan terkadang posesif (Haryatmoko, 2002).

Melalui metode genealogi yang disampaikan Foucault mendiskusikan tentang hubungan antar manusia yang membentuk relasi kekuasaan dan hal demikian diterapkan dalam kebudayaan dan komunikasi antarmanusia. Hal ini tentu saja berkaitan dengan terbentuknya sebuah relasi kuasa dalam kehidupan sehari-hari dengan asumsi bahwa setiap kita memiliki kesempatan untuk mempengaruhi, mendominasi serta juga dapat terpengaruh. Dalam bukunya yang berjudul *Power/Knowledge*, Foucault memfokuskan analisisnya pada kekuasaan yang bekerja pada individu sebagai unit terkecil, karena kekuasaan berada di seluruh relasi sosial dan tidak terbatas pada lokasi tertentu. Di sisi lain, argumen ini kemudian menjadi kuat pada saat melihat tulisan dari antropolog lain bahwa, tidak ada seorang pun yang memiliki atau mengendalikan kekuasaan dalam berbagai koneksi termasuk institusi, keahlian, dan pengetahuan (Li, 2012)

Selanjutnya Foucault secara khusus tertarik untuk menguji hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Terdapat pengetahuan dan kebenaran sebagai akibat kekuasaan dan kuasa tampil sebagai sumber yang menjadi sumber pengetahuan dan kebenaran (Kebung, 2018). Selanjutnya pemikiran yang terkenal dari Foucault adalah kuasa atau pengetahuan. Foucault menyatakan dalam bukunya *power/knowledge*, bahwa *power* atau kekuasaan ialah sebuah cara yang menciptakan rasionalitas hukum dan pengetahuan sebagai metode dan alat untuk menegakkan kekuasaan yang lebih luar (Pratama, 2021). Artinya kekuasaan dan pengetahuan mempunyai keterkaitan dan hubungan yang timbal balik. Pemahaman inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini, dengan mengungkap relasi kuasa yang terbentuk dalam implementasi kebijakan yang melibatkan masyarakat dan aktor-aktor lainnya.

Kekuasaan menjadi metode pembenaran bagi hukum dan pengetahuan. Begitupun sebaliknya, dengan melegalkan pengetahuan maka kekuasaan akan didapatkan. Beliau berasumsi bahwa tidak ada praktik pelaksanaan kekuasaan yang tidak memunculkan pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak memandang relasi kuasa (Syafiuddin, 2018). Dari pemikiran ini, tampaknya Foucault memperlihatkan bagaimana individu saat ini lahir sebagai objek dan subjek tersebarnya relasi kuasa dalam kehidupan sehari-hari dan dapat di implementasikan dalam hal yang sederhana.

Kekuasaan seharusnya dapat dipahami dalam implementasi bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana tempat kekuasaan itu berlaku. Dalam buku *The History Of Sexuality Vol.1* (1990:94-95) dalam (Mudhoffir, 2013)

Foucault menawarkan lima proposisi mengenai kekuasaan diantaranya: 1). Kekuasaan bukan sesuatu yang diperoleh, dipakai atau dibagikan tetapi kekuasaan berada di berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak; 2). Relasi kuasa yang dimaksud bukanlah relasi secara struktural, melainkan ada yang dikuasai, dan menguasai dalam relasi sosial; 3). Kekuasaan dari bawah menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya datang dari otoritas atau institusi, tetapi juga berasal dari interaksi dan dinamika sosial sehari-hari; 4) *Distingsi Binary Oposisi* artinya dalam pandangan ini, konsep baik dan buruk, dominan dan terdominasi, menjadi tidak mutlak, karena setiap orang terlibat dalam relasi kekuasaan yang saling mempengaruhi; 5). Relasi Kekuasaan Intensional dan Non-subjektif.

Poin di atas digunakan untuk melihat interaksi sosial dalam kelompok masyarakat yang terlibat dalam program. Penelitian bisa menggali bagaimana relasi kekuasaan terbentuk dalam proses sosial sehari-hari, termasuk bagaimana kepercayaan, jaringan sosial, dan norma-norma budaya berperan dalam implementasi program. Begitupun penekanan pada *Distingsi Binary Oposisi* artinya dapat mengeksplorasi bagaimana kategori-kategori seperti penerima manfaat dan penyelenggara program. Terdapat kemungkinan bahwa individu atau kelompok dapat berpindah antara posisi dominan dan terdominasi, dan bagaimana hal ini memengaruhi partisipasi mereka dalam program. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan semata mata milik pribadi individu, melainkan terjalin dalam setiap interaksi sosial, kekuasaan itu terdistribusi dan muncul dalam konteks tertentu.

Dalam implementasi program BSPS interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan aktor lain menciptakan dinamika kuasa yang mempengaruhi distribusi sumber daya dan pengambilan keputusan. Misalnya, siapa yang diakui sebagai penerima manfaat atau bagaimana kebijakan diinterpretasikan dalam praktik sehari-hari adalah hasil dari relasi kuasa yang saling berinteraksi. Dengan memahami kekuasaan sebagai hal yang imanen dalam setiap interaksi sosial, penelitian ini dapat menggali bagaimana kekuasaan terbentuk dan direproduksi dalam konteks program bantuan tersebut. Selain itu, konsep *power/knowledge* Foucault juga relevan dalam meneliti bagaimana pengetahuan dan informasi seputar program ini diproduksi dan dipertukarkan, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi posisi dan suara masyarakat dalam proses implementasi. Dengan demikian, analisis ini dapat menyumbangkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana relasi kuasa terbentuk dan dapat mempengaruhi efektivitas serta keadilan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai peranan penting untuk mengarahkan, memperkuat, dan menginformasikan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu menyediakan bukti empiris yang mendasari justifikasi untuk penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, tulisan mengenai relasi kekuasaan dapat ditemui di berbagai jurnal maupun buku hasil penelitian dari antropologi. Berkaitan dengan adanya program BSPS sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang memiliki kaitan erat dengan kekuasaan dan pengetahuan lokal dalam

pelaksanaannya. Kajian mengenai relasi kuasa menjadi perhatian bagi aktivis, politikus dan peneliti.

Salah satu tulisan menarik menggunakan perspektif teori berkenaan dengan relasi kuasa ialah tulisan dari (Gugat et al., 2022) yang berjudul Relasi Kekuasaan antara Pemerintah, Masyarakat dan LSM pada Revitalisasi Teluk Jakarta. Tulisan ini membahas tentang sebuah projek Revitalisasi Teluk Jakarta yang melibatkan banyak pihak dan terlihat bahwa setiap pihak memiliki kekuasaannya. Dalam tulisan ini, penulis membagi menjadi tiga relasi yang saling mempengaruhi persebaran kekuasaan, di antaranya wilayah kekuasaan pada tingkat lokal; semua pihak terlibat yang memiliki kekuasaan berbeda pada tingkatannya; dan yang terakhir terbentuknya ruang kekuasaan dalam proses perencanaan hingga pemanfaatan. Ketiga pembagian relasi ini di lihat melalui teori *Power Cube* oleh Gaventa. Teori ini melihat bahwa terdapat beberapa sisi dalam implementasi kebijakan yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Memperlihatkan bahwa kekuasaan terjadi dalam relasi sosial yang berada pada level tertentu dalam suatu ruang, dan membentuk formasi. Hal ini memiliki relevansi yang erat dengan penelitian ini dengan asumsi yang sama bahwa kekuasaan terjalin dalam relasi sosial masyarakat, dan membentuk formasi atau pola yang kemudian penulis artikan sebagai relasi kuasa.

Hal ini memberikan pandangan bagi peneliti bahwa dalam mengidentifikasi relasi kuasa, langkah awal yang dilakukan ialah menginventarisasi aktor yang terlibat dan kapital apa yang dimiliki oleh orang yang terlibat dalam kebijakan tersebut agar kita dapat menemukan pola relasi kuasa yang terbentuk. Layaknya

dalam artikel ini menyampaikan bahwa terdapat 3 unsur yang berperan membentuk relasi kekuasaan, yaitu pemerintah, LSM, dan masyarakat itu sendiri. Ketiga unsur ini memiliki kekuasaan yang berbeda pada tarafnya. Realitas ini kemudian dijelaskan dengan istilah *Power Over* yang dipegang oleh pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah memegang kekuasaan sebagai penentu kebijakan. Lain halnya dengan istilah *power with* berjalan bersama akademisi guna perencanaan. Aktor lain ialah masyarakat dan NGO yang berkolaborasi untuk mendapatkan kepentingannya masing-masing. Sehingga dari aktor-aktor ini dapat melihat bagaimana relasi kekuasaan terbentuk dan diwujudkan dalam misi tertentu.

Kajian sejenis juga ditulis oleh mahasiswa UNAIR yang berjudul *Governmentality* dalam Program Jalin Matra: Studi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. Skripsi ini sama-sama menggunakan perspektif kekuasaan dari Foucault yang dilatarbelakangi dari adanya tidak tepat sasaran dan intervensi dari DPRD dalam pengusulan penerima bantuan. Kasus ini sebanding dengan latar belakang penelitian ini ditulis. Tentunya tulisan ini memberikan gambaran bagaimana teori Foucault bekerja dalam melihat relasi kuasa dalam suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat 3 unsur penting yang membangun relasi erat selama pelaksanaan program Jalin Matra (Oktavia Trianahadi, 2014). Di antaranya ialah aktor perumus kebijakan, aktor pelaksana dan aktor yang tercantum dalam surat keputusan penerima bantuan. Pola yang disampaikan dalam tulisan ini memuat bahwa setiap aktor memiliki relasi yang kuat dan terjalin dalam sebuah kinerja kerja secara formal.

Perlu dilihat riset ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang mana dalam penelitian Jalin Matra, penekanan pada aktor pembuat kebijakan, pelaksana, dan penerima bantuan. Sebaliknya, penelitian ini dapat mengeksplorasi aktor yang lebih beragam, termasuk masyarakat lokal, pengembang perumahan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), partai politik, tenaga fasilitator serta bagaimana masing-masing aktor ini berinteraksi dalam konteks program perumahan. Hal ini menjadi kebaruan dalam riset dengan fokus pada konteks lokal dan partisipasi masyarakat dalam program bantuan perumahan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana program tersebut diterima dan dievaluasi oleh masyarakat yang terlibat, yang berbeda dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih umum.

Relasi kuasa yang terbangun dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya menjadi indikator keberhasilan, dan dapat menilai efektivitas program ini bagi masyarakat. Mengenai efektivitas program berkenaan dengan partisipasi masyarakat memuat banyak perhatian dari kalangan peneliti sosial yang juga bertujuan untuk evaluasi program. Salah satunya tulisan dari Pramudita Febrihana, Sishadiyati, dan Wiwin Priana (2023) dengan judul Efektivitas Program BPS dalam Mendorong dan Meningkatkan Inisiatif Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Tambaksari Guna Memperbaiki RTLH Dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) Dalam Mendorong dan Meningkatkan Inisiatif Keswadayaan Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari Untuk Memperbaiki Rumah Tak Layak Huni dalam jurnal ilmiah wahana pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya

partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta peran swadaya dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Melalui bantuan BSPS ini masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam memperbaiki kehidupan mereka, artinya poin Stimulan atau pendorong dalam program ini dapat tercapai dan dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pembangunan partisipatif (Febrihana et al., 2023). Tentu saja ada faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal di masyarakat. Melalui aktor yang berperan dalam pendampingan masyarakat agar mendapat pemahaman yang baik mengenai program BPS. Tulisan ini memiliki relevansi pada partisipasi masyarakat dan proses pemberdayaan yang menjadi kunci keberhasilan BPS. Melalui tulisan ini, penulis dapat melihat faktor pengetahuan masyarakat tentang program menjadi penting sebagai bentuk legitimasi kekuasaan dari masyarakat kepada pihak penguasa yang dalam artian yakni pemerintah. Hal ini tentu berkaitan dengan urgensi penelitian yang dilakukan peneliti, dengan mengungkap relasi kuasa yang terbentuk, dan menempatkan pengetahuan itu sebagai bentuk kekuasaan dari masyarakat menjadi sebuah kebaruan riset ini.

Tulisan dari Nugroho memberikan pandangan yang menarik. Mengabaikan keberadaan pengetahuan dalam pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah dosa besar, karena pengetahuan lokal dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan keterbutuhan suatu kebijakan sebagai jawaban dari permasalahan sosial masyarakat. Keberadaan pengetahuan lokal akan

lebih efektif jika berdampingan dengan pengetahuan ilmiah sehingga terjadi kesepakatan antara masyarakat dan jalanya program pemerintah.

Dalam tulisan ini memberikan konsep tentang pengetahuan sebagai kekuasaan oleh sekelompok masyarakat, yang kalkulasikan dari waktu ke waktu melalui pengalaman hidup masyarakat melalui interaksinya dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Tetapi, pengetahuan lokal dalam hal ini memiliki pandangan, dan artian makna yang berbeda dibentuk oleh lingkungan dan interaksi yang menghasilkan resistensi atau penerimaan di masyarakat (Nugroho et al., 2018). Tulisan ini memberikan kata kunci dalam penelitian ini bahwa pentingnya kerja sama antara pengetahuan dan kekuasaan yang berjalan beriringan dan tidak mengenal tempat, atau dominasi.

Selanjutnya, penelitian yang di lakukan oleh Dian Nur Aini, et all juga menyoroti mengenai partisipasi masyarakat dalam program BSPS di Gampong Pucangombo. Hasil dari penelitian ini di sampaikan dalam jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam , peneliti menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat terkategori antusias dapat dilihat dari sumber dana yang optimal dengan melihat bentuk swadaya yang mereka punya dinilai cukup besar sehingga proses pembangunan rumah bagi penerima bantuan dapat berjalan mulus mungkin hanya ada hambatan kecil akan tetapi masih bisa dikendalikan. Sehingga perolehan dari program BSPS yaitu berkurangnya hunian yang tidak layak dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat (Aini et al., 2023). Dalam penelitian ini hanya memberikan gambaran keberhasilan program dengan analisis banyak swadaya yang mampu di keluarkan oleh masyarakat. Sementara jika berbicara partisipasi tentu

banyak hal yang menjadi faktor pendukung tingginya partisipasi dan adanya indikator untuk menilai apakah partisipasinya sudah baik atau belum. Kemudian hal inilah yang coba peneliti berikan pertimbangan melalui penelitian ini bahwa menilai partisipasi masyarakat dalam program BSPS memiliki hubungan kausalitas yang kompleks, salah satunya berkenaan dengan bagaimana kekuasaan dijalankan di masyarakat.

Terakhir, tulisan dari Mudhoffir dalam jurnal masyarakat, Jurnal Sosiologi dengan judul *Governmentality* dan Pemberdayaan dalam Advokasi Kasus Lumpur Lapindo. Dalam tulisan ini memuat bagaimana relasi kekuasaan berperan dalam melihat kasus lumpur lapindo yang berkaitan dengan isu lingkungan. Maka dari itu ini menjadi kajian ekologi politik yang menarik karena diasumsikan oleh penulis bahwa dalam banyak gerakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat baik secara formal pemerintahan atau NGO dalam menyiasati isu lingkungan, masih terdapat tumpang tindih kebutuhan dan kepentingan. Dalam tulisan ini mendefinisikan pemberdayaan yang dapat berkolaborasi antara kelompok marginal dan NGO sebagai pendamping pemberdayaan. Dari hal tersebut, dilihat bahwa penulis menilik isu ekologi politik dengan konsep pemberdayaan serupa dengan bagaimana riset ini dilakukan namun yang membedakannya adalah penelitian ini nantinya akan fokus pada aktor yang terlibat dalam sebuah solusi kebijakan yang melibatkan masyarakat sebagai objek pemberdayaan utama melalui stimulus yang diberikan oleh pemerintah.

Menggunakan konsep *governmentality* yang disampaikan Foucault tentang relasi kuasa dengan istilah *conduct of conduct* yakni relasi kuasa yang mengadaikan

adanya kebebasan tetapi sekaligus mengarahkan (Mudhoffir, 2011). Konsep ini tentu saja sesuai dengan riset ini dengan adanya aktor aktor yang terlibat memberikan ruang pendisiplinan masyarakat sebagai penerima bantuan dan mengarahkan penerima bantuan untuk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan berlangsung.

Mengakhiri tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang relasi kuasa dalam implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya menjadi hal yang penting untuk dipahami dalam konteks yang lebih luas. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dibahas, menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak hanya melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan LSM, tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan lokal dan konteks sosial yang spesifik. Melalui analisis pandangan Foucault, kita melihat bahwa kekuasaan terjalin dalam setiap aspek interaksi sosial, menciptakan pola yang memengaruhi efektivitas program.

Mengidentifikasi kapital dan aktor yang terlibat, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika yang membentuk relasi kuasa dalam implementasi program BSPS. Kebaruan riset ini terletak pada fokusnya terhadap partisipasi masyarakat dan pengetahuan lokal sebagai bentuk legitimasi kekuasaan, yang sering kali diabaikan dalam penelitian sebelumnya. Melalui pemahaman mendalam tentang bagaimana relasi kuasa terbentuk, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong keberhasilan program bantuan yang lebih efektif di masa depan.

d. Kerangka Pemikiran

Kebudayaan dalam masyarakat menjadi bagian penting dari cara masyarakat merespons, bertindak dan memersepsikan sesuatu. Hal ini disampaikan Ward Goodenough mengenai konsep kebudayaan sebagai sistem kognitif. Budaya adalah bentuk dari hal yang ada dalam pikiran manusia (*mind*), terdiri dari model-model yang dimiliki manusia untuk menerima, menghubungkan dan menafsirkan fenomena (Keesing, 2014). Goodenough, dalam pandangannya tentang budaya sebagai sistem kognitif, menekankan bahwa pengetahuan tidak sekadar kumpulan fakta objektif, melainkan merupakan konstruksi mental yang muncul dari model-model berpikir yang ada dalam masyarakat. Model-model inilah yang membantu individu dalam menafsirkan fenomena di sekitarnya, sehingga pengetahuan menjadi landasan bagi cara pandang dan tindakan mereka.

Di sisi lain, Foucault mengemukakan konsep "*power/knowledge*" yang menunjukkan bahwa pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari hubungan kekuasaan. Menurut Foucault, apa yang dianggap sebagai pengetahuan valid selalu dikonstruksi dalam konteks tertentu, di mana kekuasaan memainkan peran penting dalam menentukan norma, kebenaran, dan praktik sosial. Dengan demikian, pengetahuan juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol perilaku individu serta struktur sosial. Goodenough maupun Foucault berpendapat bahwa pengetahuan ialah produk dari interaksi sosial dan kultural. Pengetahuan dilahirkan dan berkembang melalui relasi, norma, dan struktur sosial yang ada.

Goodenough melihat sistem kognitif budaya sebagai cara manusia mengorganisir dan menafsirkan pengalaman, sementara Foucault melihat bahwa

pengetahuan digunakan sebagai instrumen kekuasaan yang mengatur perilaku dan membentuk struktur sosial. Dengan kata lain, keduanya mengakui bahwa pengetahuan tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dalam masyarakat.

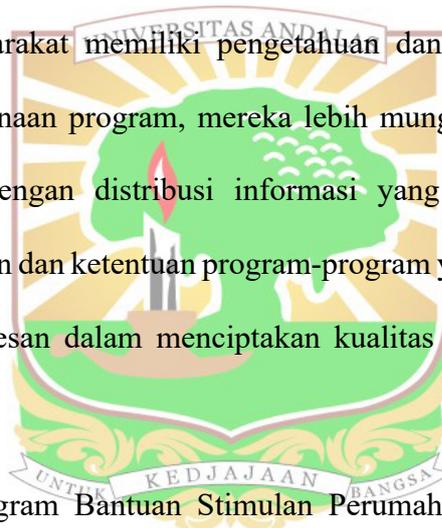
Berdasarkan konsep kebudayaan sebagai sistem kognitif atau pengetahuan penelitian ini menarik perhatian pada pengetahuan tersebut sebagai kekuasaan dan didapatkan dalam relasi sosial. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan relasi kuasa yang terbentuk dari implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya sebagai kebijakan dari pemerintahan.

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bireuen melibatkan masyarakat lokal sebagai penerima bantuan, pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pihak eksternal yang juga berperan dalam program BSPS. Setiap aktor di atas memiliki kepentingannya masing-masing dan hal ini diasumsikan dapat dipengaruhi oleh kebudayaan sebagai bagian dari cara berpikir sekelompok masyarakat. Aktor yang terlibat memainkan kepentingannya sehingga membentuk relasi kuasa.

Terdapat elemen-elemen yang menjadi bahan analisis untuk menemukan pola relasi kuasa yang terbentuk. Melalui pemikiran Foucault mendiskusikan mengenai relasi yang terjadi antar manusia dan bagaimana praktik kekuasaan dalam konteks kebudayaan dan komunikasi antar individu dalam sebuah kelompok masyarakat (Pratama, 2021). Pemikiran ini mengarahkan penulis pada konsep kekuasaan itu tersebar dimana-mana dan hal ini berkaitan dengan pengetahuan yang dapat

mempengaruhi kekuasaan. Sebagaimana diasumsikan bahwa, tidak ada praktik kekuasaan yang tidak memunculkan pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak memandang relasi kekuasaan (Syafiuddin, 2018). Di dalam kajian ini, masyarakat memiliki pengetahuan tentang kebutuhan dan kondisi perumahan swadaya merupakan hasil dari relasi kuasa yang ada di komunitas tersebut.

Melalui penelitian di Kecamatan Jeumpa ini dapat menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dapat menjadi alat kekuasaan yang penting. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang proses pelaksanaan program, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi aktif. Ini berkaitan dengan distribusi informasi yang baik dan pengetahuan mengenai setiap tahapan dan ketentuan program-program yang dapat meningkatkan partisipasi dan kesuksesan dalam menciptakan kualitas hunian yang layak bagi masyarakat.

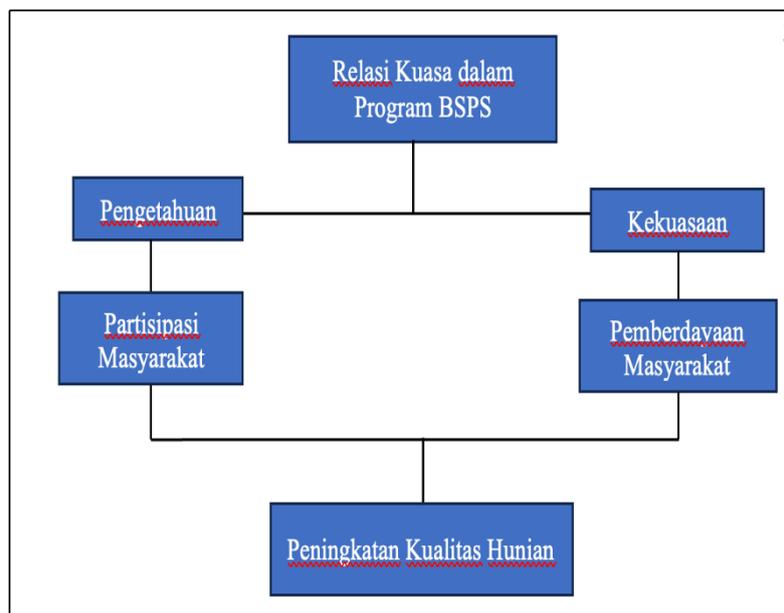


Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terdiri dari beberapa tahapan dengan metode pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan yang didampingi oleh tenaga fasilitator guna mengarahkan masyarakat pada keputusan terbaik dalam perbaikan rumahnya. Secara struktur Program BSPS ini berada dalam bagian program kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada bagian Direktorat Jenderal Perumahan. Metode pemberdayaan yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mampu berdaya dan mampu berperan aktif dalam perbaikan kehidupannya.

Secara teoritis pemberdayaan ialah upaya membuka harapan untuk rakyat miskin agar bisa mengorganisasi diri dalam menyelesaikan berbagai bentuk perkara dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam (Ismi, et all. 2021). Tetapi pada posisi ini masyarakat menengah ke bawah tidak patut dilihat sebagai pihak yang serba kekurangan dan dijadikan sebagai objek pasif penerima layanan semata, melainkan kelompok masyarakat yang mesti diperhatikan dan memiliki kekuasaan atas pengetahuan yang mereka miliki untuk dapat bertindak dalam rangka peningkatan mutu kehidupan.



Bagan 1. Alur Berpikir Relasi Kuasa Dalam Program BSPS



Foucault melihat pengetahuan bukan hanya sekadar informasi atau fakta, tetapi juga merupakan produk dari kekuasaan yang ada dalam masyarakat (Kebung, 2018). Foucault menyatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bersifat represif; ia juga

bersifat produktif. Artinya, kekuasaan menciptakan pengetahuan dan sebaliknya, pengetahuan juga dapat mengubah atau memperkuat struktur kekuasaan.

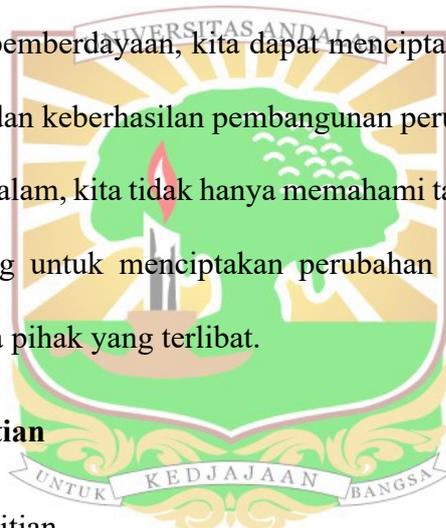
Melalui metode pemberdayaan masyarakat, pemahaman ini sangat penting, terutama dalam upaya menciptakan hunian yang layak. Pemberdayaan masyarakat dalam program BSPS ialah bentuk komitmen masyarakat yang memiliki penghasilan UMP mampu membangun rumah layak huni (Zubaedi, 2013). Sebagai upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat, diperlukan suatu langkah untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas hunian untuk menunjang kehidupan. Selain itu, diperlukan upaya aktif untuk menciptakan iklim dan suasana yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan, khususnya warga (Algiffari, 2023). Oleh karena itu pemberdayaan merupakan langkah konkret yang mesti dilakukan agar dapat memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk perbaikan huniannya.

Analisis relasi kuasa dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menunjukkan kompleksitas interaksi antara berbagai aktor yang terlibat, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak eksternal. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk mendemokratisasi proses pengambilan keputusan dan memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas media untuk meningkatkan partisipasi, tetapi juga sebagai metode untuk mengubah relasi kuasa yang ada. Ketika masyarakat diberikan akses terhadap pengetahuan dan sumber daya, mereka

mulai menyadari kekuatan yang mereka miliki. Dengan pengetahuan yang memadai mengenai program, ketentuan, dan proses yang terkait, masyarakat dapat secara proaktif berpartisipasi dalam setiap tahap implementasi. Hal ini menciptakan dinamika baru, di mana masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pasif, melainkan sebagai mitra yang memiliki suara dan pengaruh.

Keberhasilan program BSPS sangat tergantung pada seberapa baik masyarakat dapat beradaptasi dan mengelola relasi kuasa yang muncul. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan pihak eksternal, serta pendekatan yang inklusif dalam proses pemberdayaan, kita dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk partisipasi aktif dan keberhasilan pembangunan perumahan. Melalui analisis relasi kuasa yang mendalam, kita tidak hanya memahami tantangan yang ada, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.



e. **Metode Penelitian**

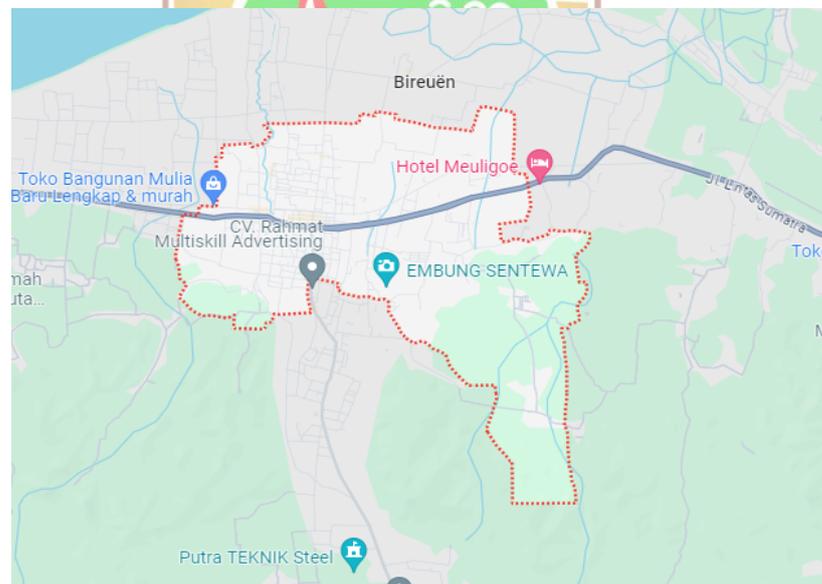
1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu wilayah penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di Provinsi Aceh. Pada periode penerimaan tahun 2024 Kabupaten Bireuen tercatat sebagai daerah pertama yang menerima bantuan dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain yang belum menerima surat keputusan. sebagai penerima bantuan pertama dari beberapa kabupaten/kota lainnya. Fenomena ini menarik untuk dikaji, mengingat dalam tahun-tahun sebelumnya, surat keputusan penerima bantuan

umumnya diterbitkan secara serentak. Namun pada tahun ini mengalami perubahan, dimana surat keputusan penerima bantuan di keluarkan secara bertahap. Hal ini di sampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Wilayah 1, percepatan pemberian bantuan di Kabupaten Bireueun di dasari oleh pertimbangan terkait dinamika tahun politik.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada salah satu gampong yang berlokasi di Kabupaten Bireuen yakni di Gampong Blang Cot Tunong, Kecamatan Jeumpa. Penerima bantuan di Gampong Blang Cot Tunong yang berjumlah 10 unit rumah bantuan.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian



Sumber: Google Maps

Kecamatan Jeumpa, juga terletak di pinggiran Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, adalah salah satu kecamatan yang memiliki karakteristik unik. Daerah ini lebih dominan dalam aktivitas pertanian, dengan banyak lahan pertanian yang subur. Masyarakat Jeumpa sebagian besar

menggantungkan hidup pada sektor pertanian, termasuk tanaman pangan dan tanaman perkebunan seperti kelapa, kakao, dan palawija. Selain itu setengah dari masyarakat Jeumpa ini memiliki usaha furnitur dan memiliki sumber daya kayu yang cukup banyak sehingga menjadi mata pencaharian masyarakat setempat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengambilan data dilakukan secara langsung di lapangan secara empiris. Indikator penting ketika melakukan penelitian dengan metode kualitatif adalah hasil dari pengumpulan data yang mendalam dan detail serta mengamati apa yang terjadi di lapangan (Wijaya, 2015). Sebagaimana Creswell dalam Wijaya, 2015 menyatakan bahwa penelitian lapangan merupakan ciri khas dari kajian antropologi. Dalam menggunakan metode ini peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaan peneliti dan objek kajian yang akan diteliti tidak bisa dipisahkan. Demikian untuk menginput dan menganalisis data dapat dilakukan selama penelitian berlangsung ataupun setelah terlaksananya pengambilan data.

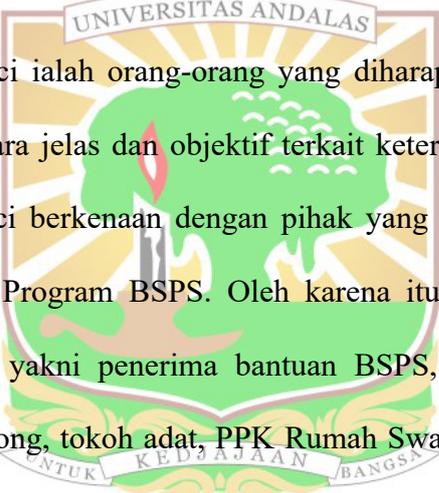
Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi yang bersifat holistik. Pendekatan ini bertujuan memahami realitas yang berkenaan dengan terbentuknya relasi kuasa di tengah masyarakat dalam implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Bireuen. Menurut Creswell dalam (Jhon, W, 2015) pendekatan etnografi kritis ini ialah mengungkap respons masyarakat tentang pelaksanaan program BPS

dan berkenaan dengan sistem kekuasaan, prestise, keistimewaan, dan otoritas digunakan selama pelaksanaan program BSPS.

3. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Artinya peneliti memilih informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai dengan keterbutuhan data dengan indikator yang sudah di tentukan, di antaranya:

Peneliti membagi 2 kategori informan di antaranya:

- 
- a. Informan kunci ialah orang-orang yang diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan objektif terkait keterbutuhan data. Sekaligus informan kunci berkenaan dengan pihak yang terlibat langsung dalam implementasi Program BSPS. Oleh karena itu informan kunci dalam penelitian ini yakni penerima bantuan BSPS, Tenaga fasilitator dan Kepala Gampong, tokoh adat, PPK Rumah Swadaya Sumatera 1 selaku pelaksana program, Tenaga Ahli selaku pengawas dan Tim Pengusul.
 - b. Informan biasa ialah orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti namun sebatas hal-hal tertentu. Dalam penelitian ini informan biasa adalah penerima bantuan tahun sebelumnya dan masyarakat umum.

Informan dalam wawancara terdiri dari beberapa kategori di antaranya: ialah masyarakat umum, penerima bantuan pada tahun sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

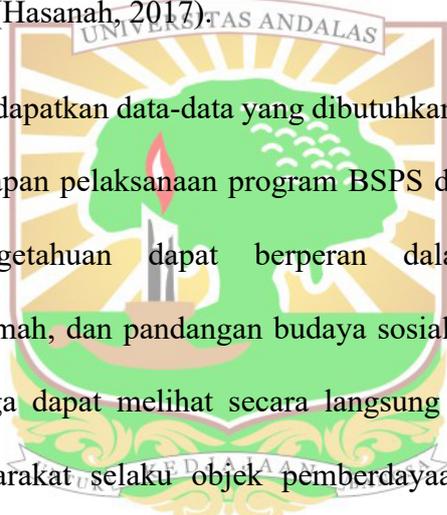
Menurut Suwartono (2014: 41) dalam (Endang Werdiningsih & Abdul Hamid B, 2022). Proses pengumpulan data ialah serangkaian cara yang digunakan untuk menghimpun data, menjangkau data, dan melihat realitas yang ada di lapangan. Saat tahapan ini berlangsung, peneliti memiliki peranan penting karena penelitalah yang bisa memutuskan dan menyimpulkan kapan waktu untuk memulai dan kapan waktu untuk mengakhiri apabila data dirasa cukup.

Dalam penelitian etnografi, prosedur penelitian kualitatif dimulai dengan menjelajahi lokasi atau individu yang dapat menjadi sumber data atau subjek penelitian. Seorang peneliti seyogianya mampu mengidentifikasi permasalahan di lokasi yang di tuju sesuai dengan tujuan penelitian dan kemudian memperluas relasi untuk menemukan sumber data potensial lainnya. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan situasi sosial, sebagaimana menurut (Mantja, 2005) terdiri dari tiga elemen utama: tempat, pelaku (orang), dan kegiatan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tugas peneliti maka dibutuhkan langkah/metode pengambilan data;

a. Observasi partisipasi

Peneliti melakukan pengamatan dengan berpartisipasi langsung dalam aktivitas sosial budaya dan pembangunan kelompok yang diteliti (Wijaya, 2015). Dalam hal ini peneliti memiliki akses yang baik untuk tergabung dalam objek penelitian, karena peneliti sendiri menjadi fasilitator pendamping yang kebersamai masyarakat dalam pelaksanaan program

BSPS dengan begitu, peneliti dapat terlibat secara langsung dalam proses kegiatan BSPS. Sebagaimana observasi partisipasi dimaksud bahwa orang yang mengadakan observasi ikut serta dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan observasi partisipasi di antaranya: bahan observasi harus disesuaikan dengan tujuan observasi; waktu dan format pencatatan harus dilakukan segera setelah kejadian dengan menggunakan kata kunci; urutan kronologis yang bersifat metodis; dan menjaga objektivitas; Tujuan dan keadaan menentukan sejauh mana partisipasi (Hasanah, 2017).



Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti akan ikut serta dalam setiap tahapan pelaksanaan program BSPS dan mencoba mengamati bagaimana pengetahuan dapat berperan dalam perencanaan dan pembangunan rumah, dan pandangan budaya sosial menyikapi program ini serta peneliti juga dapat melihat secara langsung dalam bentuk apa saja partisipasi masyarakat selaku objek pemberdayaan masyarakat. Melalui observasi partisipasi ini peneliti juga dapat membangun kedekatan dengan masyarakat penerima bantuan selaku informan kunci, dan tokoh pemerintah daerah selaku pendukung terlaksananya program beserta tenaga fasilitator yang turut mendampingi masyarakat. Observasi partisipasi juga dapat menemukan hal yang belum pernah diperhatikan oleh orang lain, kemudian inilah yang menjadi kekuatan dari metode observasi partisipasi (Sharp, 2003).

b. Wawancara mendalam

Menurut Moleong (2005: 186), wawancara mendalam ditujukan pada pusat penelitian dan melibatkan eksplorasi masalah dan fokus penelitian secara menyeluruh, jujur, dan tidak terbatas. Dalam hal ini, daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya digunakan untuk melakukan metode wawancara mendalam.

Wawancara mendalam ini menghasilkan informasi mengenai pengetahuan dan tanggapan masyarakat terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, bagaimana masyarakat memosisikan diri dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana mereka memahami program tersebut sehingga mempengaruhi partisipasi dan memungkinkan masyarakat untuk bertanya tentang efektivitas program sebagai solusi sosial. Menurut Spradley (2006), wawancara mendalam adalah rangkaian diskusi pribadi di mana peneliti secara bertahap menambahkan rincian tambahan untuk membantu informan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan (Wijaya, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa dua tahap utama wawancara mendalam adalah membangun hubungan baik (membangun hubungan yang kuat) dan mengumpulkan informasi.

Melalui wawancara mendalam, peneliti akan mendapatkan informasi mengenai relasi kuasa yang terbentuk dalam pelaksanaan program BSPS kemudian dapat mengidentifikasi bentuk pengetahuan yang sekiranya

berpengaruh terhadap implementasi program. Melalui wawancara mendalam peneliti dapat menemukan realitas yang tidak di duga sebelumnya dan dapat menemukan realitas lapangan yang menjadi masalah penelitian. Seperti halnya dinamika pelaksanaan program BPS yang terdapat di lapangan, tanggapan masyarakat mengenai pelaksana kerja dari TFL selaku pendamping dan bahkan menggali pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan lokal terkait dengan pembangunan rumah dan berjalannya program BPS.

c. Dokumentasi

Teknik ini menjadi penting sebagai bukti konkret keterlibatan peneliti dalam pelaksanaan program BPS. Dokumentasi adalah proses mengamati langsung untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian. Ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran jelas secara visual tentang kondisi di lapangan dan mendapatkan sumber data utama mengenai bagaimana pengaruh budaya lokal terhadap persepsi masyarakat terhadap kebijakan BPS dan dampaknya pada partisipasi masyarakat.

Peneliti mendokumentasikan aktivitas masyarakat saat pelaksanaan rembuk warga untuk perencanaan pembangunan, droping material dan pelaksanaan pembangunan begitu pun koordinasi dengan Kepala Gampong sebagai pemerintah daerah yang membantu fasilitator dalam pelaksanaan program. Dokumentasi ini berguna sebagai bukti partisipasi dan kehadiran masyarakat serta keikutsertaan masyarakat dalam program BPS.

d. **Membuat Catatan Lapangan**

Catatan lapangan dapat dikerjakan saat peneliti di lapangan, dan setelah dari lapangan melakukan observasi partisipasi maupun wawancara. Tujuannya ialah untuk menghimpun data yang dikumpulkan selama di lapangan agar memudahkan dalam interpretasi nantinya, dikarenakan ingatan peneliti yang senantiasa tidak mampu menangkap semua data saat di lapangan. Catatan lapangan juga menjadi instrumen kunci dalam pengolahan data nantinya saat penulisan kembali penelitian, karena terkait semua realitas yang ada di lapangan akan dituliskan secara rinci di catatan lapangan. Begitu pun dengan pengalaman etik selama pelaksanaan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data etnografi melibatkan penafsiran makna dan fungsi berbagai tindakan manusia secara jelas, sebagai hasil deskriptif dan penjelasan verbal tanpa terlalu mengandalkan analisis kuantitatif dan statistik. Meskipun demikian, data statistik akan digunakan untuk memperkuat argumen peneliti. Data yang diperoleh dari observasi partisipatif dan wawancara mendalam akan dianalisis bahkan saat di lapangan. Hasil data empiris kemudian dikelompokkan dan dikategorikan berdasarkan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian. Data dan fakta yang terkumpul akan dibandingkan dengan data lain untuk mencapai pemaknaan yang utuh sebagai tujuan penelitian melalui analisis yang konstruktif.

f. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini berawal dari kesempatan penulis untuk ikut dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melalui program kampus merdeka di Provinsi Aceh. Mendapatkan kesempatan sebagai pendamping fasilitator pemberdayaan masyarakat yang bertugas mendampingi masyarakat dalam pembangunan dan seluruh proses BSPS.

Selama masa pembekalan bersama PPK Rumah Swadaya II Satuan Kerja Penyedia Perumahan Provinsi Aceh, yakni Bapak M. Sakti Akbari, S.Ars sekaligus sebagai mentor beliau menyampaikan evaluasi setiap tahun dari program BSPS. Menjadi langkah awal bagi penulis sebagai peneliti untuk melihat permasalahan di lapangan seperti apa dan isu sosial budaya apa yang sekiranya mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi. Ketika pertemuan itu yang menjadi poin penting ialah keberhasilan dari program BSPS belum sepenuhnya dicapai, baik secara teknis maupun secara pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Beliau menyampaikan banyak sebab hal ini bisa terjadi, tenaga Ahli BSPS juga menambahkan sering kali pada capaian memberdayakan masyarakat selalu menjadi masalah. Terutama dalam partisipasi masyarakat yang selalu memiliki dinamika yang berbeda beda setiap daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat terkhusus pada bidang pemberdayaan.

Selama satu bulan penulis mendapatkan materi, studi kasus dan simulasi cara kerja pemberdayaan yang dilakukan dalam program BSPS. Pada saat ini juga penulis berusaha untuk “mencuri” data dari apa yang di sampaikan oleh Tenaga Ahli, Kepala Balai Penyedia Perumahan, Tenaga Fasilitator Lapangan serta Pejabat

Pembuat Komitmen dan menariknya pada kesempatan itu beberapa kali penulis bisa bertemu, bercengkerama dengan tim pengusul dari pemerintah daerah. Tentu saja waktu yang demikian berguna untuk mendalami bagaimana teknis pelaksanaan program BPS yang capaian yang seperti apa hendak dicapai dalam bidang pemberdayaan, dan mencoba menganalisis kemungkinan apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program BPS dan mencoba menganalisis berdasarkan kajian ilmu antropologi sosial.

Setelah itu sampai saat adanya surat perintah dari pimpinan untuk mengharuskan mahasiswa magang turun ke lapangan untuk mendampingi masyarakat. Kabupaten Bireuen menjadi lapangan praktik penulis untuk mengimplementasikan materi saat pembekalan kemarin. Melihat secara umum bagaimana masyarakat di Kabupaten Bireuen melalui survei awal sebelum penetapan lokasi penugasan. Daerah dengan komposisi demografi yang beragam, dan berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Kepala Gampong daerah ini memiliki tradisi yang berkaitan dengan adaptasi dan kepercayaan tertentu.

Dari kondisi tersebut, penulis memutuskan untuk menulis skripsi tentang relasi kuasa dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, sebagai langkah awal saya mencoba mengumpulkan bahan bacaan mengenai struktur pelaksana dan siapa saja yang terlibat dalam program ini serta mencoba mengumpulkan dokumen-dokumen dari kantor berupa evaluasi, proposal dan perihal administrasi lainnya. Selain itu mencoba untuk mengetahui perihal pengetahuan lokal yang berkaitan dengan perumahan hanya terbatas tentang tradisi

tertentu dan banyak jurnal yang mengatakan bahwa eksistensi tradisi tersebut sangat dijaga baik oleh masyarakat.

Realitas yang ditemukan bahwa ternyata tradisi tersebut nyatanya sekarang sudah mulai pudar. Oleh karena itu, penulis menjadi semakin tertarik untuk melihat bagaimana cara kerja program BPS dalam konteks relasi kuasa serta bagaimana partisipasi masyarakat berperan dalam keberhasilan atau kegagalan program ini.

Dalam waktu kurang lebih 40 hari penulis berada di lapangan mengumpulkan data sembari melakukan aktivitas magang yang sebetulnya langsung bersinggungan dengan pengambilan data. Menjadi pendamping fasilitator pemberdayaan sekaligus melakukan observasi partisipasi dalam setiap proses pelaksanaan program BPS dan sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat, membangun kepercayaan dan membuat masyarakat mau terbuka untuk diwawancarai. Posisi sebagai fasilitator menjadi peluang yang bagus selama penulis mengambil data, dan ini juga didukung oleh Tenaga Fasilitator Lapangan serta PPK Rumah Swadaya yang membantu memberikan saran dan masukan. Namun selama penelitian ini berlangsung, tentu ada kendala salah satunya ialah kendala bahasa.

Terdapat beberapa masyarakat yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia, dan untuk hal ini saya dibantu oleh TFL dalam menerjemahkan serta sebagai penghubung komunikasi kami saat wawancara. Tentu saja dalam penyusunan skripsi ini, banyak bahan bacaan dan kutipan wawancara untuk mendukung hasil dari penelitian. Seiring dengan berjalannya penelitian, penulis semakin menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalan program BPS bukan

hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada dinamika sosial dan politik yang membentuk relasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan etnografi kritis, saya terus mengumpulkan data melalui wawancara lanjutan, observasi partisipatif, serta analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang implementasi program ini.

Pada tahap akhir penelitian, penulis mulai menyusun hasil temuan dan menganalisisnya dalam kerangka teori relasi kuasa Foucault. Penulis melihat bagaimana mekanisme kontrol dan disiplin bekerja dalam program BSPS, bagaimana pemerintah membentuk narasi tertentu untuk melegitimasi kebijakan mereka, serta bagaimana masyarakat menanggapi dan menegosiasikan posisi mereka dalam program ini. Dengan pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang kebijakan perumahan berbasis masyarakat serta implikasinya terhadap dinamika sosial di tingkat lokal.

